KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT

NOMOR SOP	: W3.OT.02.02-
TGL. PEMBUATAN	: 20 Desember 2019
TGL. REVISI	: 6 Januari 2021
TGL. EFEKTIF	: 6 Januari 2021
DISAHKAN OLEH	: KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT **R ANDIKA DWI PRASETYA** **NIP 19601113 198503 1 002**
NAMA SOP	: **USULAN PENETAPAN PENGAJUAN GOLONGAN RUMAH DINAS**

DASAR HUKUM:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tengtang pengelolaan BMN/Daerah
2. Peraturan Menteri Keuangan No.76/PPMK.06/2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara
3. Peraturan Menteri Keuangan No.8/PMK.O6/2018 tentang Pengelolaan barang milik Negara yang berasal dari barang rampasan Negara dan barang gratifikasi
4. Peraturan Menteri Keuangan No.57/PMK.06/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Negara
5. Peraturan Menteri Keuangan No.118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
6. Peraturan Menteri Keuangan No.247/PMK.06/2016 tentang Pengasuransian Barng Milik Negara
7. Peraturan Menteri Keuangan No.83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara
8. Peraturan Menteri Keuangan No.111 /PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
9. Peraturan Menteri Keuangan No.181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Mampu mengoperasikan computer
2. Memahami tugas dan fungsi sebagai pengelola BMN
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi SIMAK BMN
4. Mengetahui tugas dan fungsi system dari prosedur administrasi pemerintah

KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1.SOP Pelaporan BMN 2. SOP Penatausahaan BMN Tingkat Pusat	1. Kompuer/printer/scanner 2. Jaringan internet 3. Alat tulis kantor 4. Aplikasi pengelolaan BMN 5. disposisi
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Penetepan Pengajuan golongan rumah dinas dapat mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan yang berdampak menjadi penyumbang opini BPK	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
USULAN PENETAPAN PENGAJUAN GOLONGAN RUMAH DINAS

No	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kakanwil	Kadivmin	Kabag Umum	Kasubbag Keuangan dan BMN	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima usulan pengajuan pemindahtanganan dan memerintahkan kepala divisi administrasi untuk menindaklanjuti	MULAI						15 Menit	Disposisi Kepala Kantor Wilayah	
2	Menugaskan Kepala Bagian Umum menindaklanjuti usulan penetapan pengajuangolongan rumah dinas						Disposisi Kepala Kantor Wilayah	15 menit	Disposisi Kepala Divisi Administrasi	
3	Menugaskan Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan untuk menindaklanjuti usul penetapan pengajuan golongan rumah dinas						Disposisi Kepala Divisi Administrasi	15 menit	Disposisi Kepala Bagian Umum	
4	Mempelajari Usulan pengajuan pemindahtanganan dan Menugaskan pelaksana untuk menghimpun usulan penetapan pengajuan golongan rumah dinas						Disposisi Kepala Bagian Umum	15 menit	Arahan Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan	
5	Menghimpun data pendukung usulan penetapan pengajuan golongan rumah dinas kepada Kasubbag Keuangan dan BMN				T		Arahan Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan	3 hari	konsep data usulan penetapan pengajuan golongan rumah dinas	
6	Mengoreksi konsep usulan penetapan pengajuan yang di lampiri data pendukung usulan penetapan pengajuan golongan rumah dinas dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Umum			T			konsep data usulan penetapan pengajuan golongan rumah dinas	30 menit	konsep nota dinas dan data usulan penetapan pengajuan golongan rumah dinas yang telah dikoreksi	
7	Mengoreksi berkas usulan pengajuan dan menyetujui usulan penetapan pengajuan golongan rumah dinas serta menyampaikan kepada Kepala Divisi Administrasi		T		Y		konsep nota dinas dan data usulan penetapan pengajuan golongan rumah dinas yang telah dikoreksi	30 menit	surat dan berkas usulan penetapan pengajuan golongan rumah dinas	
8	Mengoreksi dan meneliti usulan berkas penetapan pengajuan dan menyetujui usulan penetapan pengajuan golongan rumah dinas serta menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah			Y			surat dan berkas usulan penetapan pengajuan golongan rumah dinas	20 menit	surat dan data usulan penetapan pengajuan golongan rumah dinas yang telah di setujui kadivmin	
9	Menyetujui usulan penetapan pengajuan golongan rumah dinas untuk kemudian ditindaklanjuti	SELESAI	Y				surat dan data usulan penetapan pengajuan golongan rumah dinas yang telah di setujui kadivmin	15 menit	Usulan penetapan pengajuan golongan rumah dinas yang telah disetujui kakanwil	